DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

E. Utrecht, 1963. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia Cet VI*. Jakarta. Penerbit dan Balai Buku ichtiar.

GatotSupramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.

Jonathan Sarwono, 2010, *Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*. C.V Andi Offset.

Mohammad Hatta, 1997. *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta. Mutiara

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan. Bandung.* Rosda Karya.

Prins-R, Mr.W.F, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Pradny Paramita.

Philiphus M. Hadjhon, 1983, *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya. Yuridik.

Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta. UII Press, Cetakan ke-2.

Rosady Ruslan, 2003, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi.* Jakarta. Rajawali Pers.

Suwardi Endrawasra, 2009. *Metodologi Penelitian Foklor*. Yogyakarta.Medpress (Anggota IKAPI)

Tri Haryati, 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wikipedia, *Batubara, Http;/id.wikipedia.org/wiki.Batu_bara,* Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2016.

http://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium/ Di Akses Tanggal 15 Mei 2017

Radar Pat Petulai, Koran Harian rakyat Rejang lebong 30 Februari 2017

B. Undang-Undang

Undang-undangDasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Negara

Undang-undang Nomor4 Tahun 2009 Tentang Pertambangaan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Recana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA